

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, maka pembagian urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mencakup :

1. Sub Bidang Pengendalian Penduduk, yakni: a) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, b) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota.
2. Sub Bidang Keluarga Berencana, yakni: a) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local, b) Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), c) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota, d) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
3. Sub Bidang Keluarga Sejahtera, yakni: a) Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, b) Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Sedangkan pembagian urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup :

1. Sub Bidang Kualitas Hidup Perempuan, yakni: a) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota, b) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota, c) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.
2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan, yakni: a) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota, b) Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota, c) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota,
3. Sub Bidang Kualitas Keluarga, yakni: a) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota, b) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota, c) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota,
4. Sub Bidang Sistem Data Gender dan Anak, yakni Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.
5. Sub Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA), yakni: a) Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota, b) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota,
6. Sub Bidang Perlindungan Khusus Anak, yakni: a) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota, b) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota, c) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:



Penetapan rencana strategis program dan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan lainnya yang diberikan kepala daerah



Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas PPKBPPPA



Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi



Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas PPKBPPPA



Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas PPKBPPPA

1.2 Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

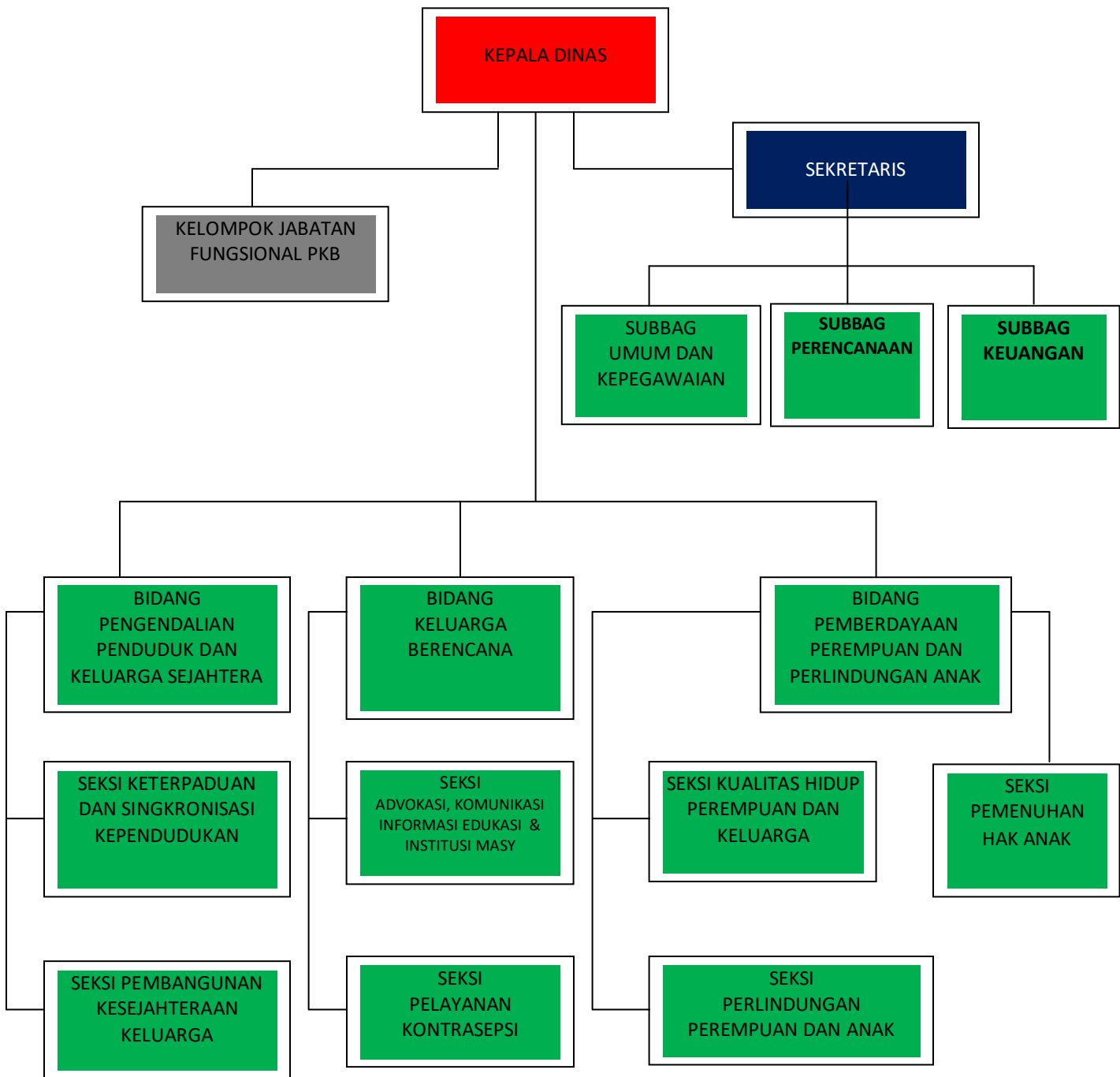
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan dasar Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Berpedoman Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan lainnya yang diberikan kepala daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. perumusan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. evaluasi dan pelaporan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tergambar pada Gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas PPKBPPA

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perumusan permasalahan perangkat daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dimasa datang.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah. Hal ini untuk menjamin konsistensi serta sinergitas perangkat daerah antar wilayah dan antara pusat dan daerah, yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) kabupaten, provinsi, dan nasional dalam proses perumusannya

Identifikasi permasalahan perangkat daerah dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Belum optimalnya organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP);
- b. Rendahnya pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif;
- c. Belum optimalnya kelompok kegiatan ketahanan keluarga.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Belum optimalnya peran perempuan dalam pemerintahan;
- c. Belum optimalnya tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layak anak terkait dengan status kota layak anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Laporan Kinerja Pemerintahan (LAKIP) atau Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

^{d.} Laporan Kinerja (LKj) Dinas PPKBPPPA ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dalam laporan kinerja disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja-SKPD.

e.

Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi pemerintah / perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (*Good Government*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (RPJMD 2018-2023).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Hulu Sungai Selatan terkait dengan penetapan/kebijakan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melalui tahapan-tahapan hasil rumusan bersama seluruh komponen/unit kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan dokumen kerja SKPD yang memuat program dan kegiatan serta target dan indikator yang hendak dicapai untuk periode 1 (satu) tahun .

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan

suatu strategi dan kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Berpedoman isu strategis RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, khususnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program pimpinan perangkat daerah dan pembangunan perangkat daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan perangkat daerah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan. Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis. Dimana berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar seperti kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri sampai pada tahun 2017

teridentifikasi bahwa beberapa kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal. Pada urusan kesehatan beberapa permasalahan juga masih perlu untuk diperhatikan. Seperti halnya kualitas pelayanan kesehatan yang masih belum optimal dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini dapat terlihat dengan tingginya usia kawin pertama kurang dari 20 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kondisi-kondisi tersebut tentu memberikan *pressure* tersendiri terhadap pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga pembangunan manusia mengalami perlambatan. Dengan demikian maka, perwujudan aksesibilitas serta kualitas pelayanan di bidang kesehatan perlu untuk dikedepankan mengingat sumber daya manusia yang baik merupakan wujud nyata dari cita-cita UUD 1945 yaitu kesejahteraan masyarakat.

2. Peningkatan Optimalnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Wawasan Lingkungan
- Peran strategis pembangunan level *bottom* banyak diakomodir Desa, garda terdepan pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat adalah desa, sehingga kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan karakter dan pondasi perekonomian serta peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan masih belum berjalan optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya kapasitas kelembagaan di desa sehingga kualitas pengelolaan desa menjadi tidak begitu efektif dan efisien. Oleh karena itu, perluasan jangkauan pelayanan melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar perlu untuk diupayakan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Jika memperhatikan data, isu perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender mengalami progress positif. Momentum positif terjadi khususnya pada peningkatan penyelesaian pengaduan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan semakin meningkatnya peran perempuan dalam organisasi dan pembangunan. Hal ini memberikan sinyal positif bahwa perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender mendapat respon positif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kondisi ini tentu harus dipertahankan dan perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga momentum positif tersebut dapat *sustain* dan semakin

berkualitas.

3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis

Tuntutan pembangunan modern memaksa perangkat daerah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit. Sampai pada tahun 2019, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum berjalan optimal. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi lebih. Inilah sebabnya mengapa pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih perlu untuk ditingkatkan.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Hulu Sungai Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah urusan Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Predikat AKIP	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA
3	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	<p>Alasan Pemilihan : Persentase rata-rata usia kawin pertama masuk dalam indikator kinerja adalah dalam rangka melaksanakan program KB serta pengendalian penduduk dengan sasaran para remaja untuk tidak kawin muda / pendewasaan usia perkawinan (PUP)</p> <p>Cara Perhitungan Indikator : $\frac{\text{Jumlah wanita kawin pertama usia } < 20 \text{ tahun}}{\text{Jumlah total perkawinan}} \times 100\%$</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Bidang KB - Laporan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
4	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>Alasan Pemilihan : IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan yang diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan gender. Dengan IPG dapat mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.</p> <p>Cara Perhitungan Indikator : $IPG = 1/3 (X \text{ EDE}(1) + X \text{ EDE}(2) + I \text{ inc-dis})$ Keterangan : X EDE(1) = X EDE untuk harapan hidup I inc-dis = Indeks distribusi penghasilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Bidang Pemberdayaan Perempuan
		Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	<p>Alasan Pemilihan : 1. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat 2 UUD Negara</p>	Laporan Bidang Perlindungan Anak

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA
			RI tahun 1945); 2. UU NO. 35 th 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Permen Pemberdayaan Perempuan No. 13 th 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan Cara Perhitungan Indikator : $\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$	

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah (*top-down*) dan ke samping (*horizontal-diagonal*) dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*);
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Hulu Sungai Selatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KAB. HULU SUNGAI SELATAN

2.2.1 SEKRETARIAT (URUSAN LAYANAN/PENUNJANG RUTIN)

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7				
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		Predikat AKIP	Predikat	81,89 (A)	0	0	0	81,89 (A)	
		1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	Penilaian	81,89	0	0	0	81,89
				Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Persen	100%	66,67%	83,33%	91,66%	100%
		1.1	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	5	9	12	15
		1.2	Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	8	10	11	12

Pada tabel 2.2, dapat dijelaskan bahwa sekretariat merupakan urusan layanan/urusan rutin. Dimana tujuan merupakan Misi 5 (lima) dari RPJMD 2018 – 2023. Yang dari Indeks Reformasi Birokrasi target sebesar 23,50. Untuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendukung hasil dari Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu Nilai / Predikat AKIP sebesar 81,89. Dengan Perjanjian Kinerja dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 1 program yaitu Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 2 (dua) kegiatan yaitu : Penyusunan Dokumen AKIP sebanyak 15 (sebelas) dokumen dan Penyusunan Dokumen Keuangan sebanyak 12 (dua belas) dokumen.

Aspek pemenuhan dokumen-dokumen AKIP yaitu :

Nama Dokumen		Jumlah	
1	Renstra	1	dokumen
2	Berita Acara Reviu Renstra	1	dokumen
3	Cascading Kinerja Tahun 2019	1	dokumen
4	Renja 2019 (Murni, Perubahan)	2	dokumen
5	IKU + SK 2019	1	dokumen
6	PK Murni 2019 Ess II s.d Ess IV Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1	dokumen
7	PK Perubahan 2019 Ess II s.d Ess IV Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1	dokumen
8	Rencana Aksi 2019	1	dokumen
9	Capaian Kinerja Triwulan Th. 2019	4	dokumen
10	Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2019	1	dokumen
11	Peta Strategi & Struktur Organisasi serta Template Format Keselarasan Kinerja	1	dokumen
Jumlah		15	dokumen

Untuk Aspek pemenuhan dokumen-dokumen AKIP, pemasangan target di triwulan diambil berdasarkan dokumen berurutan. Dan pada tahun 2019 mempunyai target sebanyak 15 dokumen. Adapun 15 dokumen ini adalah hasil komulatif dari triwulan sebelumnya. Sehingga pada tahun 2019 dokumen yang terkumpul yaitu Renstra beserta berita acara reviu Renstra, Renja (Murni dan Perubahan), Dokumen Cascading, SK IKU, Perjanjian Kinerja (Murni dan Perubahan), Rencana Aksi, Laporan Capaian Kinerja Triwulan (3 dokumen), dan dokumen pendukung lainnya terlebih dahulu dibuat, karena sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu

Sungai Selatan.

Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan yaitu :

Nama Dokumen		Jumlah	
1	Renstra	1	dokumen
2	Renja	1	dokumen
3	RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan	2	dokumen
4	PRA RKA Murni dan Perubahan	2	dokumen
5	RKA Murni	1	dokumen
6	RKA Perubahan	1	dokumen
7	DPA	1	dokumen
8	Laporan Triwulan	1	dokumen
9	Laporan Prognosis Semesteran 1	1	dokumen
10	Laporan Tahunan (CALK)	1	dokumen
Jumlah		12	dokumen

Sedangkan untuk Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan, pemasangan target di tiap triwulan diambil berdasarkan dokumen berurutan. Dan pada tahun 2019 mempunyai target yaitu 12 dokumen, penyusunan dokumen inti seperti Renstra, Renja, RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan, Dokumen PRA RKA Murni dan Perubahan, RKA Murni, DPA, terlebih dahulu dibuat, karena sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari segi keuangan dan pelaksanaan kegiatan, selanjutnya pelaporan keuangan secara triwulan.

2.2.2 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7			
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
Menurunkan pernikahan di bawah usia 20 tahun			Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia ≤ 20 tahun	Persen	73,02	0	0	0	73,02
	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja		Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	Persen	73,02	0	0	0	73,02
		Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan	Persen	10	2,5	5,0	7,5	10,00
			Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Persen	78,89	70	75	78,9	78,99
		Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah remaja teradvokasi dan menerima Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja	orang	357	140	257	307	357
		Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi	PUS	34.612	34.312	34.412	34.512	34.812

Tujuan	Sasaran		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2		3	4	5	6	7			
			Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	Persen	60,2	50,17	53,51	56,86	21,08
				Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK	Persen	18,18	0	9,09	0	18,18
			Pembinaan kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	kelompok	180	150	160	170	180
			Penyusunan data kependudukan dan keluarga	Jumlah instansi KB yang menyelenggarakan program KKBPK	buah	2	0	1	0	2

Pada tabel 2.2.2 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dijelaskan bahwa tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah menurunkan pernikahan di bawah usia 20 tahun. Sebagai alur pendukung dari tujuan Dinas maka disusun program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu:

1. Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan target:
 - a. Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan sebesar 10% dan,
 - b. Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif sebesar 78,89 %
2. Program Peningkatan Keluarga Sejahtera dengan target:
 - a. Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif sebesar 60,2 %, dan
 - b. Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK sebesar 18,18 %

Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) mempunyai 2 kegiatan yaitu:

- 1) Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan target 357 orang, target triwulan I sebanyak 140 orang, target triwulan II sebanyak 257 orang, target triwulan III sebanyak 307 orang dan target triwulan IV sebanyak 357 orang. Target pada triwulan adalah hasil kumulatif pada tiap triwulan.
- 2) Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dengan target 34.612 PUS, target triwulan I sebanyak 34.312 PUS, target triwulan II sebanyak 34.412 PUS, target triwulan III sebanyak 34.512 PUS dan target triwulan IV sebanyak 34.612 PUS. Target pada triwulan adalah hasil kumulatif pada tiap triwulan.

Program Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai 2 kegiatan yaitu:

- 1) Pembinaan kelompok kegiatan ketahanan keluarga dengan target 180 kelompok, target triwulan I sebanyak 150 kelompok, target triwulan II sebanyak 160 kelompok, target triwulan III sebanyak 170 kelompok, dan target triwulan IV sebanyak 180 kelompok. Target pada triwulan adalah hasil kumulatif pada tiap triwulan.

- 2) Penyusunan data kependudukan dan keluarga dengan target 2 instansi, dilaksanakan pada triwulan II dan triwulan IV. Target pada triwulan IV adalah hasil komulatif pada tiap triwulan.

2.2.3. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7				
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pangarusutamaan gender serta perlindungan anak			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,27	0	0	0	90,27	
	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,27	0	0	0	90,27	
			Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	Persen	2,03	0,67	1,35	1,35	2,03	
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender	Persen	36,84	0	36,84	36,84	36,84	
		Pelaksanaan PUG di tingkat daerah	Jumlah SKPD yang perencanaan dan penganggaran responsif gender	SKPD	10	0	10	10	10	

			Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif	Persen	8,11	0	5,95	8,11	8,11
			Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	Jumlah organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang dibina	organisasi	6	0	3	6	6
			Program Peningkatan Pelindungan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	Persen	100	0	100	100	100
			Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Jumlah PATBM desa yang aktif	buah	2	0	1	0	2
			Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layak anak berbasis kluster	Persen	27,78	5,56	11,11	18,52	27,78
			Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah indikator yang terpenuhi	kluster	15	3	3	4	5

Pada tabel 2.2.3 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pangarusutamaan gender serta perlindungan anak. Sebagai alur pendukung dari tujuan Dinas maka disusun program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan target:
Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender sebesar 36,84%,
2. Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan dengan target:
Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif sebesar 8,11 %,
3. Program Peningkatan Perlindungan Anak dengan target:
Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan 100 %, dan
4. Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dengan target:
Tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layan anak berbasis kluster sebesar 27,78%.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan mempunyai 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender (PUG) dengan target 10 SKPD dimana kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II. Adapun 10 SKPD yang menjadi target adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian, dan Dinas Sosial

Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan mempunyai 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dengan target 6 organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang akan dilaksanakan pada triwulan II dan pada

triwulan III. Organisasi perempuan yang akan dibina yaitu Dharma Wanita Persatuan Kab. HSS, Gabungan Isteri Wakil Rakyat (GATRIWARA) Kab. HSS, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. HSS, Muslimat NU, Salimah, dan Katalia.

Program Peningkatan Perlindungan Anak mempunyai 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan target 2 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) desa yang aktif, dimana akan dilaksanakan pada Triwulan II dan Triwulan IV dengan masing-masing 1 PATBM desa yang aktif.

Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pelayanan Pemenuhan Hak Anak dengan target 15 indikator yang terpenuhi, target triwulan I sebanyak 3 indikator, target triwulan II sebanyak 3 indikator, target triwulan III sebanyak 4 indikator dan target triwulan IV sebanyak 5 indikator.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK), juga tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Dengan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan tujuan dan sasaran.

Pada bab ini akan disajikan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu tahun anggaran yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2019 serta realisasi anggaran pada tahun 2019.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka tujuan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran seperti pada tabel berikut.

MISI 5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi

SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

**TABEL 3.1
PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT TAHUN 2019**

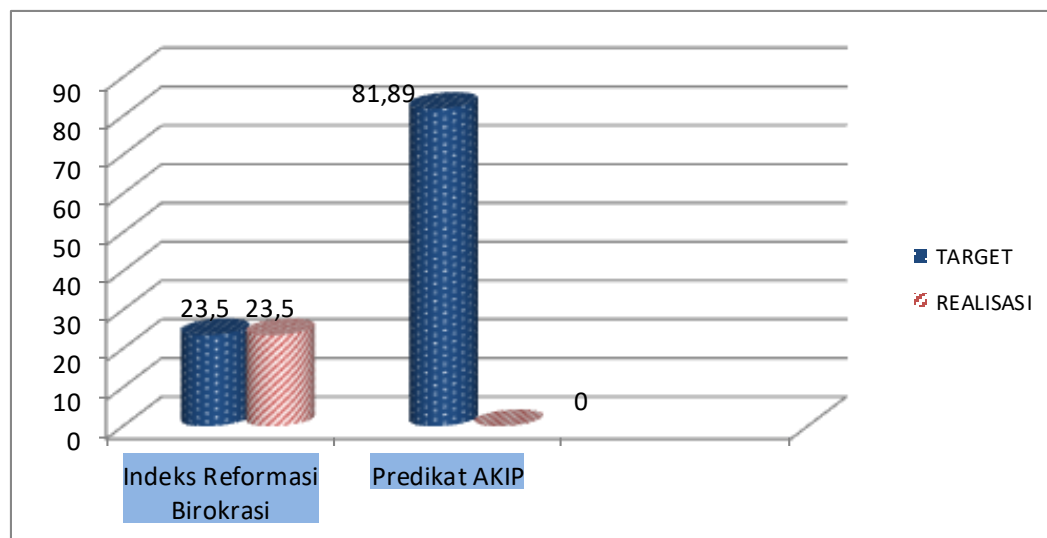
Tujuan	Sasaran		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data tahun sebelumnya (2018)	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2		3	4	5	6	7	8				9							
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	0	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			Predikat AKIP	Predikat	80,11 (A)	81,89 (A)	0	0	0	81,89 (A)	0	0	0	0	0	0	0	
		1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	Penilaian		81,89	0	0	0	81,89	0	0	0	0	0	0	0	
				Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Persen		100%	66,67	83,33	91,66	100	66,67	83,33	91,66	100	100	100	100	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data tahun sebelumnya (2018)	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)				
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5		6	7				8				9				
		1.1	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen		15	5	9	12	15	5	9	12	15	100	100	100	100
		1.2	Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen		12	3	6	9	12	3	6	11	12	100	100	100	100
		2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan	Persen		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2.1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun		1 tahun	0,25	0,50	0,75	1	0,25	0,50	0,75	1	100	100	100	100
		2.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun		1 tahun	0,25	0,50	0,75	1	0,25	0,50	0,75	1	100	100	100	100
		2.3	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun		1 tahun	0	0	0,50	1	0	0	0,50	1	0	0	100	100
		2.4	Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun		1 tahun	0,25	0,50	0,75	1	0,25	0,50	0,75	1	100	100	100	100
		2.5	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun		1 tahun	0,25	0,50	0,75	1	0,25	0,50	0,75	1	100	100	100	100

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data tahun sebelumnya (2018)	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)				
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5		6	7				8				9				
			Administrasi/Teknis Lainnya																
		2.6	Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun		1 tahun	0,25	0,50	0,75	1	0,25	0,50	0,75	1	100	100	100	100
		3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kepuasan Pelayanan	Persen		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100 %	100 %	100 %	100 %
		3.1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	tahun		1 tahun	0,5	1	1	1	0,5	1	1	1	100 %	100%	100 %	100 %
		3.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil dan kendaraan operasional kondisi baik	tahun		1 tahun	0,25	0,50	0,75	1	0,25	0,50	0,75	1	100 %	100%	100 %	100 %
		3.3	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	tahun		1 tahun	0,25	0,50	0,75	1	0,25	0,50	0,75	1	100 %	100%	100 %	100 %
		4	Program Peningkatan Kinerja Perangkat	Tingkat kepuasan pelayanan	Persen		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100 %	100%	100 %	100 %

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data tahun sebelumnya (2018)	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)				
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5		6	7				8				9				
		Daerah																	
		4.1	Pembinaan Program KBKR	Jumlah kegiatan KBKR	kegiatan		5 kegiatan	2	4	5	5	2	4	5	5	100 %	100%	100 %	100 %
		4.2	Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga	Jumlah kegiatan ketahanan keluarga	kegiatan		3 kegiatan	2	2	3	3	2	2	3	3	100 %	100%	100 %	100 %
			Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah kegiatan peran serta dan partisipasi masyarakat	kegiatan		5 kegiatan	1 keg	3 keg	4 keg	5 keg	1 keg	3 keg	4 keg	5 keg	100 %	100%	100 %	100 %
		4.3	Partisipasi Anak	Jumlah kegiatan partisipasi anak	kegiatan		2 kegiatan	0	0	2 keg	2 keg	0	0	2 keg	2 keg	0 %	0 %	100 %	100 %

Grafik 3.1
CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 1 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET



Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, pencapaian kinerja urusan kesekretariatan, sebagai tujuan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019 realisasi yang ada tidak bisa dilaporkan sebagai laporan Realisasi sasaran karena bentuknya kegiatan selama setahun, sehingga output/keluaran akan disampaikan pada akhir tahun. Pada tabel diatas mempunyai program utama sebanyak 1 program dengan kegiatan utama 2 buah. Untuk kegiatan rutin program pendukung terdapat 3 buah dan kegiatan pendukung sebanyak 13 buah yang dilaksanakan sesuai rutin pengelolaan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang terkait dengan Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Indikator Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah dengan kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP dan Penyusunan Dokumen Keuangan.

Pada indikator kinerja sasaran pertama Indeks Reformasi Birokrasi hasil capaian kami target pada tiap tiap triwulan. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak tidak melakukan pelayanan publik langsung, melainkan Indeks Reformasi Birokrasi yang diukur adalah pelayanan rutin Sekretariat kepada bidang-bidang baik dalam hal urusan ketatausahaan maupun urusan kepegawaian. Sedangkan indikator kinerja sasaran yang kedua yaitu Nilai/Peringkat AKIP hasil capaian juga kami target pada triwulan 4 akan tetapi sampai akhir tahun 2019 masih belum bisa diukur karena belum dilakukan penilaian evaluasi Laporan AKIP oleh Kemenpan RB.

Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, memiliki target kegiatan 100% atau jumlah 27 dokumen, dimana 15 untuk Dokumen Penyusunan AKIP dan 12 Dokumen dari penyusunan Dokumen Keuangan. Dari Kegiatan Penyusunan AKIP, telah dilaksanakan sebanyak 15 dokumen sebagaimana pada tabel berikut :

Nama Dokumen		Jumlah
1	Renstra	1 dokumen
2	Berita Acara Reviu Renstra	1 dokumen
3	Cascading Kinerja Tahun 2019	1 dokumen
4	Renja 2019 (Murni, Perubahan)	2 dokumen
5	IKU + SK 2019	1 dokumen
6	PK Murni 2019 Ess II s.d Ess IV Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen
7	PK Perubahan 2019 Ess II s.d Ess IV Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen
8	Rencana Aksi 2019	1 dokumen
9	Capaian Kinerja Triwulan Th. 2019	4 dokumen
10	Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2019	1 dokumen
11	Peta Strategi & Struktur Organisasi serta Template Format Keselarasan Kinerja	1 dokumen
Jumlah		15 dokumen

Sedangkan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan pada tahun 2019 terealisasi 12 dokumen dari target 12 dokumen.

Pada indikator kinerja program kami target ditiap triwulan pada aspek pemenuhan dokumen untuk kegiatan pelaporan AKIP yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Triwulan dan Akhir Tahun, serta aspek pemenuhan dokumen untuk pelaporan keuangan yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Triwulan, Semester dan Akhir.

Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di targetkan pada pada tahun 2019 ada 6 kegiatan dengan capaian 100 % yaitu kegiatan penyediaan jasa dan administrasi perkantoran, kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan penyediaan makan dan minuman, kegiatan rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan,

kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya, serta penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD yaitu pelaksanaan pawai pembangunan dan Expo.

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di targetkan 3 kegiatan dan sudah dilaksanakan 3 kegiatan dengan capaian 100 % yaitu kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Pada Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah di targetkan pada 4 kegiatan dan sudah dilaksanakan 4 kegiatan dengan capaian 100 % yaitu kegiatan pembinaan program KBKR, kegiatan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, kegiatan peran serta dan partisipasi masyarakat, dimana pada kegiatan ini selain dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga organisasi wanita yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Dharma Wanita Persatuan (DWP), Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) dimana pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan Peringatan Hari Kartini dan Peringatan Hari Ibu serta kegiatan partisipasi anak dimana pada kegiatan ini dilaksanakan Peringatan Hari Anak.

MISI 1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya

SASARAN STRATEGIS 2. Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja

**TABEL 3.2
PENCAPAIAN KINERJA URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data tahun sebelumnya (2018)	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7		10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Menurunkan pernikahan di bawah usia 20 tahun			Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia ≤ 20 tahun	Persen	74,57	73,02	0	0	0	73,02	0	0	0	72,9	0	0	0	100,17
	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja		Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	Persen	74,57	73,02	0	0	0	73,02	0	0	0	72,9	0	0	0	100,17

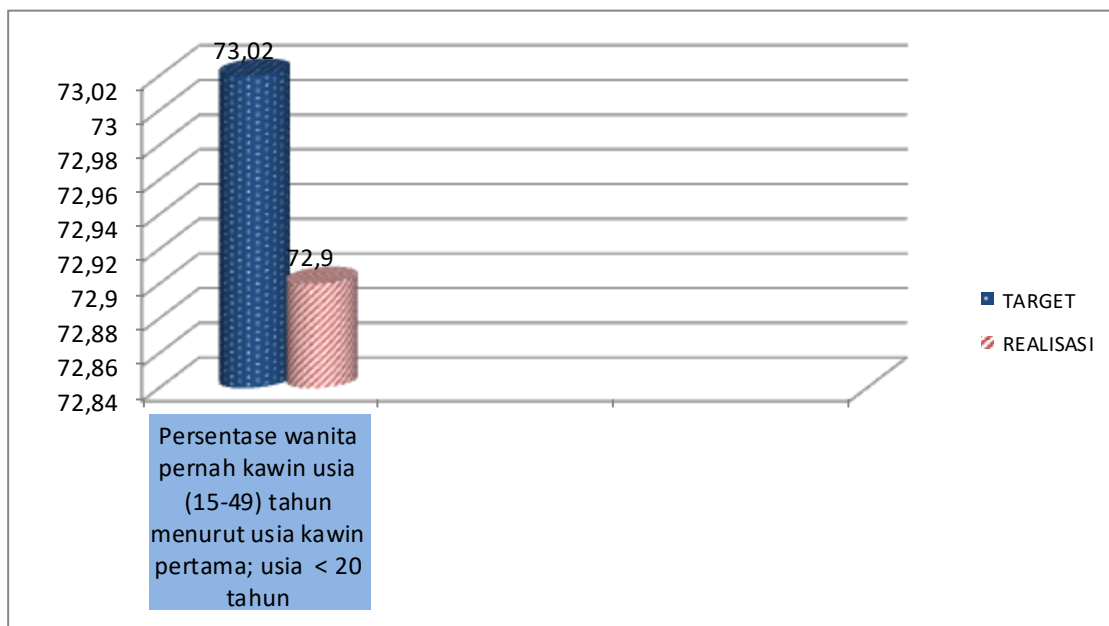
Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data tahun sebelumnya (2018)	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7		10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
		Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan	Persen	8,33	10	2,5	5,0	7,5	10	2,5	5,0	7,5	10	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Persen	78,69	78,89	78,40	78,65	78,9	78,99	78,40	78,56	78,89	76,47	100 %	99,88 %	99,99 %	96,81 %
		Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah remaja teradvokasi dan menerima Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja	orang		357	140	257	307	357	201	311	421	536	143,7 %	121,0 1%	137,1 3%	150,1 4%
		Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi	PUS		34.612	34.312	34.412	34.512	34.812	37.238	37.655	38.566	38.877	108,2 9%	109,4 2%	111,7 5%	111,6 8%
		Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Jumlah Balai KKB Kecamatan	Balai KKB Kec		11	4	8	11	11	0	8	11	11	0	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data tahun sebelumnya (2018)	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7		10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
		Pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK FISIK)																
		Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK NF)	Jumlah balai KKB Kec. yang mendapat dukungan operasional keg. program KKBPK	Balai KKB Kec		11	4	8	11	11	4	8	11	11	100%	100%	100%	100%
		Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan (DAK NF)	Jumlah faskes keluarga berencana yang mendapatkan bantuan alat dan obat kontrasepsi (Alokon)	Faskes KB		26	9	18	26	26	9	18	26	26	100%	100%	100%	100%
		Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB (DAK NF)	Jumlah kampung KB yang mendapat dukungan integrasi program KKBPK dan program lainnya	Kampung KB		22	7	14	22	22	0	14	22	22	0	100%	100%	100%
		Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh	Jumlah kader PPKBD di desa yang mendapat dukungan	Kader PPKBD		148	50	100	148	148	50	100	148	148	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data tahun sebelumnya (2018)	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7		10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
		Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK NF)	program KKBPK															
			Jumlah kader Sub PPKBD di desa yang mendapat dukungan program KKBPK	Kader Sub PPKBD														
		Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK NF)	Jumlah Media KIE terfasilitasi	buah		11	4	8	11	11	4	8	11	11	100%	100%	100%	100%
		Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	Persen	50,00	60,2	50,17	53,51	56,86	60,20	48,13	50,00	53,73	57,14	95,93 %	93,44 %	94,49 %	94,92 %
			Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK	Persen	9,10	18,18	0	9,09	0	18,18	0	9,09	0	18,18	0	100%	0	100 %

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data tahun sebelumnya (2018)	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7		10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
		Pembinaan kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	kelompok		180	150	160	170	180	154	160	173	184	102,67%	100%	101,76%	102,22%
		Penyusunan data kependudukan dan keluarga	Jumlah instansi KB yang menyelenggarakan program KKBPK	instansi		2	0	1	0	2	0	1	0	2	0	100%	0%	100%

Grafik 3.1
CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 2 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET



Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, pencapaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sebagai tujuan sasaran strategis yaitu menurunkan pernikahan di bawah usia 20 tahun pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019 berdasarkan hasil publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS melalui Survey Susenas (Sosial Ekonomi Nasional) Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama ; usia \leq 20 tahun sebesar 72,9% lebih rendah dari target, akan tetapi hal ini menunjukkan hal yang positif dikarenakan semakin rendah capaian semakin bagus dimana jumlah wanita kawin pertama usia kurang dari 20 tahun berkurang. Oleh karena itu langkah yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk merendahkan capaian yaitu dengan melakukan sosialisasi terkait Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Deklarasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bagi anak sekolah, *capacity building*, Forum Diskusi Terarah serta penyebarluasan informasi terkait advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi melalui baliho, siaran radio maupun event di masyarakat. Pada tabel diatas mempunyai 2 program yaitu Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan Program Peningkatan Keluarga Sejahtera.

Pada Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) memiliki 2 indikator kinerja program yaitu Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan yang mana pada tahun 2019 ditargetkan 12 organisasi dan sudah terealisasi 12 organisasi yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Puskesmas Kandangan, Puskesmas Gambah, Puskesmas Jambu Hilir, Puskesmas Daha Barat, KUA Kecamatan Daha Barat, SMAN 1 Daha Barat, MA Irsyadul Amin Daha Barat, SMPN 1 Daha Barat, dan MTs Babussalam Daha Barat dengan capaian 100% total organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan dan pada indikator Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif pada tahun 2019 ditargetkan 78,99 % PUS dan sudah terealisasi 76,47% dengan capaian 96,81%. Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif berasal dari jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 38.877 dan jumlah PUS sebesar 50.839 (Data capaian berasal dari laporan Statistik Rutin BKKBN). Turunnya persentase diakibatkan jumlah PUS yang ber KB meningkat pada triwulan IV sebesar 1.952 PUS. Untuk pencapaian program tersebut ada 8 kegiatan dengan 2 kegiatan yang bersumber pada Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan sasaran remaja/anak berusia 15-19 tahun yang diberikan sosialisasi dan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan dan kegiatan Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dengan sasaran Pasangan Usia Subur, serta 6 kegiatan yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pada Program Peningkatan Keluarga Sejahtera memiliki 2 indikator kinerja program yaitu persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif dan persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK. Pada indikator persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif pada tahun 2019 ditargetkan 60,20% kelompok kegiatan dan terealisasi 57,14 % dimana terdapat 184 kelompok kegiatan ketahanan yang aktif dari 322 kelompok kegiatan ketahanan yang ada dengan capaian kinerja sebesar 94,92%. Sedangkan pada persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK sudah terealisasi sesuai target yaitu 2 instansi yaitu Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dengan capaian 100%. Untuk mendukung indikator ini pada

tahun 2019 telah dilaksanakan beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi teknis bulanan bidang PPKS yang diikuti oleh Bidang Keluarga Berencana dan seluruh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan, memonitor laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan, meentry data laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan dan membuat laporan bulanan hasil dari laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan.

MISI 4. Mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

SASARAN STRATEGIS 3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

TABEL 3.3

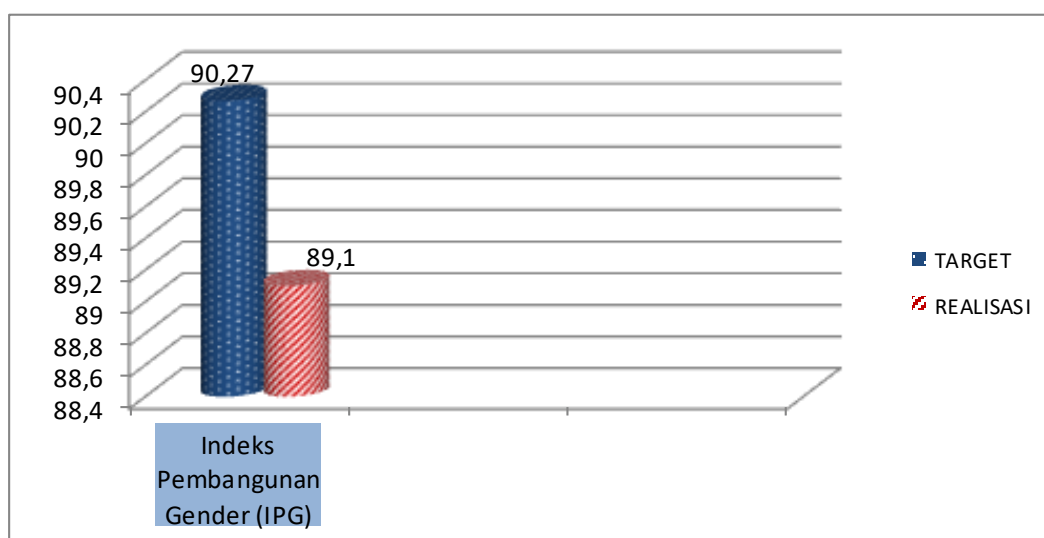
PENCAPAIAN KINERJA URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data tahun sebelumnya (2018)	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8				9				10			
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pangarusutamaan gender serta perlindungan anak			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,96	90,27	0	0	0	90,27	0	0	0	89,10	0	0	0	98,70
	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaa		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,96	90,27	0	0	0	90,27	0	0	0	89,10	0	0	0	98,70 %
			Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	Persen	0,68	2,03	0,67	1,35	0	2,03	0,67	1,35	0	2,03	100 %	100 %	0	100 %

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data tahun sebelumnya (2018)	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8				9				10			
	n gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender	Persen	10,54	36,84	0	36,84	0	0	0	36,84	0	0	100 %	100 %	0	0
		Pelaksanaan PUG di tingkat daerah	Jumlah SKPD yang perencanaan dan penganggaran responsif gender	SKPD		10	0	10	0	0	0	10	0	0	0	100 %	0	0
		Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif	Persen	4,86	8,11	0	5,95	8,11	0	0	5,95	8,11	8,11	0	100 %	100 %	100 %
		Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	Jumlah organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang dibina	organisasi		6	0	3	6	0	0	3	6	0	0	100 %	100 %	0%
		Program Peningkatan Pelindungan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100 %	100 %	100 %

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data tahun sebelumnya (2018)	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8				9				10			
		Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Jumlah PATBM desa yang aktif	buah		2	0	1	0	2	0	1	0	2	0	100 %	0	100 %
		Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layak anak berbasis kluster	Persen	0	27,78	5,56	11,11	18,52	27,78	5,56	11,11	18,52	27,78	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah indikator yang terpenuhi	kluster		15	3	3	4	5	3	3	4	5	100 %	100 %	100 %	100 %

Grafik 3.3
CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 3 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET



Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, pencapaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai tujuan sasaran strategis yaitu meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pangarusutamaan gender serta perlindungan anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Pada tahun 2019 realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang diperoleh merupakan hasil Survey dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 89,10 dengan capaian sebesar 98,70%. Berdasarkan hal tersebut untuk meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melaksanakan beberapa kegiatan kedepannya seperti peran serta dan partisipasi perempuan, pelatihan kader kepemimpinan organisasi wanita, pelatihan management organisasi wanita, pelatihan keterampilan perempuan dan remaja putri, penyuluhan tentang penghijauan kepada kelompok perempuan, penyuluhan pola pengasuhan dalam keluarga, pelatihan keterampilan pemanfaatan barang

bekas bagi organisasi wanita. Dimana kegiatan-kegiatan tersebut akan menyumbang nilai pada variable kehidupan yang layak. Pada tabel diatas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai 4 program yaitu Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan, Program Peningkatan Perlindungan Anak dan Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.

Pada program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan mempunyai indikator kinerja program Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender yang mana pada tahun 2019 mempunyai target 36,84 % dan sudah direalisasikan sebesar 36,84% dengan capaian 100% pada triwulan II. Adapun SKPD yang sudah menerapkan anggaran yang responsif gender tersebut yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian, dan Dinas Sosial. Dalam menerapkan anggaran yang responsif gender SKPD dipantau oleh 4 driver Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu Inspektorat, Bakeuda, Bappelitbangda dan Dinas PPKBPPPA.

Untuk Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan mempunyai indikator kinerja program yaitu Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif yang mana pada tahun 2019 ditargetkan 8,11% dan sudah direalisasikan 8,11 % dengan capaian 100%. Adapun organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif pada tahun 2019 yaitu Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kab. HSS, Gabungan Isteri Wakil Rakyat (GATRIWARA) Kab. HSS, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. HSS, Muslimat NU Kab. HSS, Salimah Kab. HSS dan Katalia Kab. HSS. Untuk mendukung indikator tersebut juga dilaksanakan sosialisasi perlindungan perempuan dalam rumah tangga yang dilaksanakan di kecamatan Loksado.

Program Peningkatan Perlindungan Anak mempunyai indikator kinerja program persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan, dimana pada tahun 2019 ditargetkan 100% dan sudah

terrealisasi 100% dengan jumlah kasus yang terlapor 16 kasus dan sudah diselesaikan 16 kasus.

Pada tahun 2019 ini terdapat 16 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana tabel berikut:

NO	JENIS KEKERASAN	P2TP2A	
		PEREMPUAN	ANAK
1	Fisik	2	-
2	Psikis	2	9
3	Seksual	2	10
4	Penelantaran	-	-
5	Perdagangan Orang	-	-
6	Eksplorasi	-	-
7	Lainnya	-	-
Jumlah Kasus		6	19
Jumlah Korban		6	10






Dari data yang tampak pada tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2019 kasus kekerasan psikis sebanyak 11 kasus pada perempuan dan anak, 12 kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak dan 2 kasus kekerasan fisik pada perempuan. Dengan jumlah korban anak 10 orang (8 orang anak mengalami jenis kekerasan seksual disertai psikis, 1 orang anak mengalami jenis kekerasan psikis dan 1 orang anak mengalami jenis kekerasan seksual) dan perempuan 6 orang (2 orang mengalami jenis kekerasan seksual, 2 orang mengalami jenis kekerasan fisik dan 2 orang mengalami jenis kekerasan psikis).

Untuk mendukung penurunan kasus pada anak dan perempuan dibentuk Tim Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak dengan anggota antara lain terdiri dari Jaksa anak, Pengacara, Kepolisian, RUTAN, Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Pekerja Sosial (Peksos)/Dinas Sosial, terlaksananya sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang mana pada tahun 2019 sudah dibentuk dan dibina PATBM pada Kelurahan Kandangan Barat dan desa Tambak Bitin untuk menjadi PATBM yang aktif.





Pada program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai indikator kinerja program yaitu Tingkat pemenuhan aspek Desa/Kelurahan Layak Anak berbasis Klaster, dimana pada tahun 2019 ditargetkan 27,78 % dan sudah terealisasi 27,78% dengan capaian kinerja 100%. Untuk mencapai target tersebut memperhitungkan total indikator yang mana pada tahun 2019 ada 15 indikator dan sudah terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Untuk mendukung pencapaian tersebut sudah dilaksanakan pembinaan pada Forum Anak Desa dan Kecamatan, pembinaan puskesmas dengan pelayanan ramah anak, pembinaan Sekolah Ramah Anak, terlaksananya Rapat terkait Pemenuhan Hak Anak dan rapat pengurus Forum Anak Daerah, serta sosialisasi terkait perlindungan anak/pemenuhan hak anak.

Dari keseluruhan hasil capaian kinerja urusan/bidang terkait yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, rangkuman capaian dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

TABEL 3.4
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KAB. HSS

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data tahun sebelumnya (2018)	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Status	Keterangan	
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
1	2	3	4	4	5				6				7	8	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	22,88	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50		
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Predikat AKIP	Predikat	80,11 (A)	81,89 (A)	0	0	0	81,89 (A)	0	0	0	0		Belum dilakukan penilaian AKIP	
Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	Persen	74,57	73,02	0	0	0	73,02	0	0	0	72,9			
Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,96	90,27	0	0	0	90,27	0	0	0	89,10		Tidak mencapai target	
	Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	Persen	0,68	2,03	0,67	1,35	1,35	2,03	0,67	1,35	1,35	2,03			

Keterangan:

-  Capaian > 100 %
-  Capaian > 90% - 100 %
-  Capaian > 75% - 90 %
-  Capaian < 50 %

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas, indikator ke 3 (tiga) yaitu persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun berdasarkan hasil publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS melalui Survey Susenas (Sosial Ekonomi Nasional) diperoleh 72,90 dengan pencapaian melebihi 100% sedangkan untuk indikator sasaran yang pertama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi pencapaian realisasi sama dengan target atau dengan kata lain tercapai 100%, begitu juga indikator sasaran ke 5 (lima) yaitu Persentase desa/kelurahan layak anak pencapaian kinerjanya 100%.

Sedangkan untuk indikator kinerja sasaran ke dua yaitu predikat AKIP realisasi ditargetkan pada triwulan IV akan tetapi masih belum bisa direalisasikan karena belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat. Untuk indikator 4 (empat) yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperoleh indeks 89,10 berdasarkan hasil survey dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.2. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini akan diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Di dalamnya terdapat alokasi anggaran, realisasi keuangan, persentasi capaian dan sisa anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun Anggaran 2019 yang diambil dari Laporan Fisik dan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada triwulan IV ada penambahan pagu sesuai hasil rapat dengan TAPD dimana total pagu anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi sebesar Rp. 6.269.905.700,00 terjadi penambahan sebesar Rp 44.400.000,00 dari anggaran sebelumnya. Realisasi anggaran pada tahun 2019 Bidang Keluarga Berencana sebesar Rp. 2.493.720.761,00 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp. 62.222.650,00, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp. 143.128.390,00, dan Sekretariat sebesar Rp. 1.430.052.807,00. Adapun rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.5
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2019
BERDASARKAN URUSAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KAB. HSS

1. Kesekretariatan (layanan penunjang perangkat daerah)

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1.519.951.750	540.793.200	949.115.650	1.212.707.400	1.519.951.750	238.842.314	658.483.420	941.296.740	1.430.052.807	36,65%	64,32%	82,19%	100,00%	16,19%	44,63%	63,79%	96,92%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	643.832.850	153.880.300	296.961.400	442.091.700	643.832.850	53.093.922	173.750.778	320.469.398	599.121.838	25,67	49,54%	73,75%	100,00%	8,86%	28,99%	53,46%	99,95%
Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	44.545.200	11.324.500	22.399.000	33.473.500	44.545.200	10.483.400	20.109.300	30.667.500	43.955.500	25,42%	50,28%	75,15%	100,00%	23,53%	45,14%	68,85%	98,68%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	63.600.000	15.900.000	31.800.000	47.700.000	63.600.000	5.787.983	14.532.967	26.133.079	35.662.556	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	9,10%	22,85%	41,09%	56,07%
Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	14.000.000	0	0	2.700.000	14.000.000	0	-	2.700.000	12.800.000	0,00%	0,00%	19,29%	100,00%	0,00%	0,00%	19,29%	91,43%
Penyediaan makanan dan minuman	28.104.000	10.700.800	15.702.400	19.403.200	28.104.000	2.760.000	6.000.000	9.180.000	18.020.000	38,08%	55,87%	69,04%	100,00%	9,82%	21,35%	32,66%	64,12%
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	40.250.000	15.125.000	25.400.000	36.325.000	40.250.000	9.150.000	21.000.000	27.700.000	36.600.000	32,99%	55,40%	79,23%	100,00%	19,96%	45,80%	60,41%	90,93%

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	453.333.650	100.830.000	201.660.000	302.490.000	453.333.650	24.912.539	112.108.511	224.088.819	452.083.782	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	6,18%	27,80%	55,56%	99,72%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	242.829.000	165.729.000	191.429.000	217.129.000	242.829.000	39.368.492	116.497.792	162.436.492	216.728.169	68,25%	78,83%	89,42%	100,00%	16,21%	47,98%	66,89%	89,25%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	80.239.000	80.239.000	80.239.000	80.239.000	80.239.000	32.306.000	46.150.000	76.325.000	80.152.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	40,26%	57,52%	95,12%	99,89%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	94.520.000	23.645.000	47.270.000	70.895.000	94.520.000	6.312.492	18.235.792	23.264.492	68.639.169	25,02%	50,01%	75,01%	100,00%	6,68%	19,29%	24,61%	72,62%
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	68.070.000	61.845.000	63.920.000	65.995.000	68.070.000	750.000	52.112.000	62.847.000	67.937.000	90,86%	93,90%	96,95%	100,00%	1,10%	76,56%	92,33%	99,80%
Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.610.000	2.206.500	4.608.000	7.214.500	9.610.000	477.500	2.980.800	4.420.800	9.609.750	22,96%	47,95%	75,07%	100,00%	4,97%	31,02%	46,00%	100,00%
Penyusunan Dokumen Keuangan	4.700.000	1.129.000	2.253.000	3.582.000	4.700.000	0	925.800	1.465.800	4.699.750	24,02%	47,94%	76,21%	100,00%	0,00%	19,70%	31,19%	99,99%
Penyusunan Dokumen AKIP	4.910.000	1.077.500	2.355.000	3.632.500	4.910.000	477.500	2.055.000	2.955.000	4.910.000	21,95%	47,96%	73,98%	100,00%	9,73%	41,85%	60,18%	100,00%
Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	623.679.900	218.977.400	456.117.250	546.272.200	623.679.900	145.902.400	365.254.050	453.970.050	604.593.050	35,11%	73,13%	87,59%	100,00%	23,39%	58,56%	72,79%	96,94%
Pembinaan Program KBKR	54.937.900	43.837.900	49.737.900	54.937.900	54.937.900	745.000	35.346.300	36.466.300	42.606.300	79,80%	90,53%	100,00%	100,00%	1,36%	64,34%	66,38%	77,55%
Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga	56.076.700	35.880.700	36.480.700	55.876.700	56.076.700	10.900.000	12.980.700	48.176.700	55.286.700	63,99%	65,06%	99,64%	100,00%	19,44%	23,15%	85,91%	98,59%

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	483.315.300	139.258.800	369.898.650	406.107.600	483.315.300	134.257.400	316.927.050	340.352.050	477.725.050	28,81%	76,53%	84,03%	100,00%	27,78%	65,57%	70,42%	98,84%
Partisipasi Anak	29.350.000	0	0	29.350.000	29.350.000	0	-	28.975.000	28.975.000	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	98,72%	98,72%

Pada tabel 3.5, untuk kesekretariatan, meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (Sekretariat). Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan pagu dana sebesar Rp. 9.610.000,- , dengan target tahun 2019 sebesar Rp. 9.610.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.609.750,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar 99,997%.

Kemudian untuk Program Pelayanan Administrasi Kantor ada penambahan pagu sebesar RP 44.400.000,- dari pagu sebelumnya sehingga total pagu Rp. 643.832.850,-. dengan target pada tahun 2019 sebesar Rp. 643.832.850,-. dan realisasi keuangan sebesar Rp. 599.121.838,-, sehingga capaian target rencana belanja sebesar 100 % dan capaian realisasi keuangan sebesar 99,95%. Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan pagu Rp. 242.829.000,-. dengan target pada tahun 2019 sebesar Rp. 242.829.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 216.728.169,-, sehingga capaian target rencana belanja sebesar 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar 89,25% .

Pada Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah yang merupakan program “sapu jagad” dimana kegiatan yang ada pada program ini merupakan kegiatan yang ada pada masing-masing bidang yang tidak mempunyai indikator khusus. Adapun pagu pada program ini sebesar Rp. 623.679.900,- dengan target pada tahun 2019 Rp. 623.679.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 604.593.050,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar 96,94%.

2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	4.584.721.150	417.902.000	2.721.568.640	3.855.704.850	4.584.721.150	120.855.500	564.160.260	1.258.314.510	2.555.943.411	9,12%	59,36%	84,10%	100,00%	2,64%	12,31%	27,45%	55,75%
Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja	4.521.712.500	409.739.50	2.679.830.890	3.801.822.100	4.521.712.500	118.875.500	532.999.060	1.216.462.560	2.493.720.761	9,06%	59,27%	84,08%	100,00%	2,63%	11,79%	26,90%	55,15%
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	39.978.600	13.815.000	33.147.000	39.978.600	39.978.600	12.575.500	12.575.500	31.840.000	38.267.500	34,56%	82,91%	100,00%	100,00%	31,46%	31,46%	79,64%	95,72%
Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	259.507.900	69.281.500	141.709.500	212.296.000	259.507.900	56.800.000	85.750.000	169.200.000	222.942.900	26,70%	54,61%	81,81%	100,00%	21,89%	33,04%	65,20%	85,91%
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK)	1.085.159.000	0	1.085.159.000	1.085.159.000	1.085.159.000	0	-	360.298.000	1.004.969.000	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	33,20%	92,61%
Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK NF)	955.796.460	99.295.000	458.061.460	746.046.460	955.796.460	49.500.000	273.325.560	431.454.560	617.837.650	10,39%	47,92%	78,05%	100,00%	5,18%	28,60%	45,14%	64,64%
Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan (DAK NF)	40.500.000	4.500.000	18.000.000	31.500.000	40.500.000	0	780.000	780.000	4.760.000	11,11%	44,44%	77,78%	100,00%	0,00%	1,93%	1,93%	11,75%
Operasional Penggerakan Program KKBPK di	985.600.000	109.515.000	438.100.000	766.600.000	985.600.000	0	58.450.000	105.100.000	261.100.000	11,11%	44,45%	77,78%	100,00%	0,00%	5,93%	10,66%	26,49%

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Kampung KB (DAK NF)																	
Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK NF)	267.170.540	14.668.000	110.978.930	229.572.040	267.170.540	0	46.258.000	-	117.483.711	5,49%	41,54%	85,93%	100,00%	0,00%	17,31%	0,00%	43,97%
Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK NF)	888.000.000	98.665.000	394.675.000	690.670.000	888.000.000	0	55.860.000	117.790.000	226.360.000	11,11%	44,45%	77,78%	100,00%	0,00%	6,29%	13,26%	25,49%
Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	63.008.650	8.162.500	41.737.750	53.882.750	63.008.650	1.980.000	31.161.200	41.851.950	62.222.650	12,95%	66,24%	85,52%	100,00%	3,14%	49,46%	66,42%	98,75%
Pembinaan kelompok ketahanan keluarga	41.302.750	6.182.500	36.787.750	41.302.750	41.302.750	0	26.211.200	36.501.950	41.082.750	14,97%	89,07%	100,00%	100,00%	0,00%	63,46%	88,38%	99,47%
Penyusunan Data Kependudukan dan Keluarga	21.705.900	1.980.000	4.950.000	12.580.000	21.705.900	1.980.000	4.950.000	5.350.000	21.139.900	9,12%	22,80%	57,96%	100,00%	9,12%	22,80%	24,65%	97,39%

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang memiliki sasaran menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja yang didukung dengan 2 (dua) program yaitu Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dibawah koordinasi Bidang Keluarga Berencana dimana pagu pada program ini sebesar Rp. 4.521.712.500,- yang merupakan perpaduan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 299.486.500,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 4.222.226.000,- dengan target pada tahun 2019 sebesar Rp. 4.521.712.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.555.943.411,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar 55,75%. Rendahnya realisasi keuangan dikarenakan tidak terealisasinya target KB Pria dimana pada tahun 2019 menargetkan 20 orang akan tetapi realisasinya 6 orang dan juga dikarenakan keterlambatan memulai pelaksanaan kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK).

Untuk program Peningkatan Keluarga Sejahtera dibawah koordinasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera memiliki pagu sebesar Rp. 63.008.650,- dengan target pada tahun 2019 sebesar Rp. 63.008.650,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 62.222.650,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar 98,75%.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	165.232.800	22.772.600	79.066.950	143.910.300	165.232.800	8.319.690	64.193.165	88.832.340	143.128.390	13,78%	47,85%	87,10%	100,00%	5,04%	38,85%	53,76%	86,62%
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	38.497.500	0	29.003.750	38.497.500	38.497.500	0	29.003.750	29.003.750	32.397.500	0,00%	75,34%	100,00%	100,00%	0,00%	75,34%	75,34%	84,15%
Pelaksanaan Manajemen PUG di tingkat	38.497.500	0	29.003.750	38.497.500	38.497.500	0	29.003.750	29.003.750	32.397.500	0,00%	75,34%	100,00%	100,00%	0,00%	75,34%	75,34%	84,15%
PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	10.045.000	2.262.500	6.175.000	8.807.500	10.045.000	1.131.000	4.732.000	5.269.000	7.650.000	22,52%	61,47%	87,68%	100,00%	11,26%	47,11%	52,45%	76,16%
Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	10.045.000	2.262.500	6.175.000	8.807.500	10.045.000	1.131.000	4.732.000	5.269.000	7.650.000	22,52%	61,47%	87,68%	100,00%	11,26%	47,11%	52,45%	76,16%
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK	92.724.300	10.428.100	29.031.200	74.089.300	92.724.300	5.715.300	23.912.000	42.177.000	82.294.300	11,25%	31,31%	79,90%	100,00%	6,16%	25,79%	45,49%	88,75%
Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	92.724.300	10.428.100	29.031.200	74.089.300	92.724.300	5.715.300	23.912.000	42.177.000	82.294.300	11,25%	31,31%	79,90%	100,00%	6,16%	25,79%	45,49%	88,75%
PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN ANAK	23.966.000	10.082.000	14.857.000	22.516.000	23.966.000	1.473.390	6.545.415	12.382.590	20.786.590	42,07%	61,99%	93,95%	100,00%	6,15%	27,31%	51,67%	86,73%
Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	23.966.000	10.082.000	14.857.000	22.516.000	23.966.000	1.473.390	6.545.415	12.382.590	20.786.590	42,07%	61,99%	93,95%	100,00%	6,15%	27,31%	51,67%	86,73%

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang memiliki sasaran meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak didukung dengan 4 (empat) program di bawah koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan, Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak serta Program Peningkatan Perlindungan Anak.

Pada Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan memiliki pagu sebesar Rp. 38.497.500,- dengan target pada tahun 2019 sebesar Rp. 38.497.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 32.397.500,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar 84,15%. Untuk program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan memiliki pagu sebesar Rp. 10.045.000,- dengan target pada tahun 2019 sebesar Rp. 10.045.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.650.000,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar 76,16% rendahnya realisasi dikarenakan sedikitnya kasus yang tertangani.

Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak memiliki pagu sebesar Rp. 92.724.300,- dengan target pada tahun sebesar Rp. 92.724.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 82.294.300,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar 88,75% dan pada Program Peningkatan Perlindungan Anak yang memiliki pagu sebesar Rp. 23.966.000,- dengan target pada tahun 2019 sebesar Rp. 23.966.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.786.590,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar 86,73%.

TABEL 3.6
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN DAN KINERJA TAHUN 2019
BERDASARKAN URUSAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KAB. HSS

Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator	REALISASI ANGGARAN (%)				REALISASI KINERJA (%)				%			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
SEKRETARIAT													
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Predikat AKIP	16,19	44,63	19,17	32,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan Pelayanan	8,86	28,99	24,48	14,98	100	100	100	100	11,29	3,45	1,87	1,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kepuasan Pelayanan	16,21	47,98	18,92	22,36	100	100	100	100	6,17	2,08	1,49	1,12
Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP; Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	4,97	31,02	14,98	54,00	48,15	70,37	85,19	100	9,67	2,26	5,69	1,85
Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan Pelayanan	23,39	58,56	14,22	24,15	100	100	100	100	4,27	1,71	1,37	1,03
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	2,64	12,31	16,15	28,30	0	0	0	72,9	0,00	0,00	0,00	1,31
Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan	2,63	11,79	16,14	28,25	2,5	5,0	7,5	10,00	0,95	0,42	0,28	0,18

Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator	REALISASI ANGGARAN (%)				REALISASI KINERJA (%)				REALISASI (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
	Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	2,63	11,79	16,14	28,25	78,40	78,65	78,89	76,47	29,82	6,67	2,93	1,39
Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	3,14	49,46	66,42	98,75	48,13	50,00	53,73	57,14	15,33	1,01	0,81	0,58
	Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK	3,14	49,46	66,42	98,75	0	9,09	9,09	18,18	0	0,18	0,14	0,18
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	5,04	38,85	53,67	86,62	0	0	0	89,1	0,00	0,00	0,00	1,03
	Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	5,04	38,85	53,67	86,62	0,67	1,35	1,35	2,03	0,13	0,03	0,03	0,02
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender	0,00	75,34	75,34	84,15	0	36,84	36,84	36,84	0	0,49	0,49	0,44
Program peningkatan perlindungan hak perempuan	Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif	11,26	47,11	52,45	76,16	0	5,95	8,11	8,11	0,00	0,13	0,15	0,11
Program pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	6,16	25,79	45,49	88,75	100	100	100	100	16,23	3,88	2,19	1,13
Program peningkatan perlindungan anak	Tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layak anak berbasis klaster	6,15	27,31	51,67	86,73	5,56	11,11	18,52	27,78	0,90	0,41	0,36	0,32

3.3 Daftar Prestasi Tingkat Nasional/Provinsi

Beberapa prestasi yang diraih oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KEJUARAAN/KEGIATAN	TINGKAT	PRESTASI
1	Pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-Kesehatan	Provinsi Kalimantan Selatan	Juara I
2	Bina Keluarga Remaja	Provinsi Kalimantan Selatan	Juara II
3	Pentas Seni pada Jambore Anak Daerah Prov Kalsel	Provinsi Kalimantan Selatan	Juara Harapan I
4	Forum Anak Tertib Administrasi	Provinsi Kalimantan Selatan	Juara Terbaik III
5	Lomba Inovasi dan Kreativitas Forum Anak Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Juara Harapan I
6	Lomba P2WKSS	Provinsi Kalimantan Selatan	Peringkat Utama
7	Lomba Kecamatan Sayang Ibu (KSI)	Provinsi Kalimantan Selatan	Peringkat Utama
8	Penghargaan Satyalancana Pembangunan (SP) Bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada Bupati Hulu Sungai Selatan dari Presiden RI	Nasional	Penghargaan Satyalancana Pembangunan (SP)
9	Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak oleh Kementrian PPPA	Nasional	Peringkat Pratama
10	Penghargaan Sekolah Ramah Anak Tingkat Pra Sekolah ke TK Munggu Raya oleh Kementrian PPPA	Nasional	Sekolah Ramah Anak Terbaik Tingkat Pra Sekolah
11	Pelopor Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) "Taman Palidangan Sehati" Oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Nasional	Pelopor Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)

Dokumentasi:

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BKKBIN
 NOMOR : 226/ HK/02.02.1/2019
 TANGGAL : 30 Desember 2019
 TENTANG : PEMENANG LOMBA KESATUAN GERAK PKK-KKBPK-KESEHATAN
 TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH NILAI	PEMENANG
1	Desa Asam	Hulu Sungai Selatan	814	I
2	Kelurahan Sungai Tiung	Banjartaru	796	II
3	Desa Tundakan	Balangon	756	III

Perwakilan BKKBIN
 Provinsi Kalimantan Selatan



Juara I Pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-Kesehatan (Desa Asam)

Terbaik II Lomba BKR Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan



Pentas Seni Forum Anak Daerah
 Juara Harapan I

Juara III FAD Tertib Administrasi
 Tingkat Provinsi



Juara harapan I Inovasi dan
 Kreativitas FAD Tingkat Provinsi

Peringat Utama Lomba P2WKSS Desa
 Panggungan Kec. Loksado



Peringkat Utama Lomba KSI
Kec. Loksado



Penghargaan Sekolah Ramah Anak
Tingkat Pra Sekolah Tahun 2019



Satyalancana Pembangunan (SP) Bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (KKBPk) dari Presiden Republik Indonesia



Penghargaan Kabupaten Layak Anak
Tingkat Pratama Tahun 2019



Pelopor Ruang Bermain Ramah Anak
oleh Kementerian PPPA RI

BAB IV PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang ingin di capai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

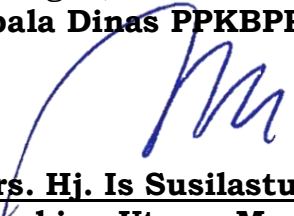
- 1) Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100% dan 0% atau belum mencapai target (belum dilakukan penilaian);
- 2) Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 72,9% atau melebihi target;
- 3) Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 89,10 % belum mencapai target dan 2,03% mencapai target dengan nilai capaian 100%.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 3 (tiga) sasaran tersebut didapatkan 1 indikator dengan pencapaian target melebihi 100 yaitu 100,16, 2 indikator dengan pencapaian target 100%, 2 indikator belum mencapai target dikarenakan hasil dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta belum ada penilaian dari Inspektorat terkait nilai AKIP.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 6.269.905.700,00 sedangkan realisasi anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 4.129.124.608,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 65,86%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.140.781.092,00.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kita semua khususnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sebagai gambaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada lintas sektor terkait lainnya baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 2 Januari 2020
Kepala Dinas PPKBPPPA



Drs. Hj. Is Susilastuti
Pembina Utama Muda
NIP. 19601219 198503 2 006

